



RENCANA KERJA

**SATPOL PP, DAMKAR & PENYELAMATAN
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai Rencana Kerja Tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Renja Kerja ini kami ucapkan terima kasih.

Pekalongan, 09 Agustus 2023
KEPALA SATPOL PP, DAMKAR
DAN PENYELAMATAN
KOTA PEKALONGAN



SRIYANA, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680709 199003 1 008

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	2
I.1 Latar Belakang.....	2
I.2 Landasan Hukum.....	3
I.3 Maksud dan Tujuan.....	5
I.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	8
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	13
2.3.1 Analisis Tingkat Kinerja.....	13
2.3.2 Permasalahan.....	14
2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian Visi Misi.....	15
2.3.4 Tatangan dan Peluang.....	15
II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	16
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	28
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	29
III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	29
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	30
III.3 Program dan Kegiatan.....	32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	42
BAB V PENUTUP.....	47

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan	9
Tabel T-C.30	Pencapaian kinerja pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	12
Tabel T-C.31	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	19
Tabel T-C.32	Usulan prgoram dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2024.....	28
Tabel 3.2	Tujuan Jangka Menengah Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2024.....	31
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan	33
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2024.....	42
Tabel 4.2	Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Anggaran Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2024	43

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang diimplikasikan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Pasal 27), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah merupakan Dokumen perencanaan PD untuk periode 1 tahun, memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Renja Perangkat Daerah juga memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah, pada tahun-tahun yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai

kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan serta mempertimbangkan hasil penjarangan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan aturan tersebut, maka dalam rangka mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan tahunan daerah perlu dibuat Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang sistematis, bermutu, akuntabel dan tepat waktu. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan tahun 2024 disusun dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Pekalongan, rencana strategis Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan dan RKPD Kota Pekalongan. Penyusunan ini dilakukan melalui proses koordinasi antar seksi di lingkungan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan, konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA dan OPD terkait di Kota Pekalongan.

I.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan tahun 2022 didasarkan kepada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 10. Peraturan Walikota Nomor 97 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;

13. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024.

I.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan tahun 2024 dimaksudkan untuk dan menyelaraskan prioritas program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu, penyusunan Rencana Kerja ini juga dimaksudkan untuk melakukan upaya sinkronisasi terhadap program-program dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pembangunan daerah pada tahun 2024. Hal ini untuk lebih meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan media untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan langkah-langkah kebijakan pemerintah daerah Kota Pekalongan pada Tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan adalah :

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program, kegiatan dan sub kegiatan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;
2. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Terdapat acuan bagi pemangku peran (stakeholder) dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketentaman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
4. Terdapat acuan untuk pertanggungjawaban Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentaman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, pada bab ini dibagi menjadi lima bagian pembahasan, yaitu :

- II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya;
- II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;
- II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, tantangan dan peluang, dampak terhadap visi/misi kepala daerah dan terhadap capaian

program nasional/ internasional serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan;

- II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD berisikan uraian mengenai perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut
- II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, diuraikan kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota.

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH, pada bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan, yaitu :

- III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
- III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah , pada bagian ini, perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah;
- III.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program/ kegiatan/ sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, tabel rencana program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, memuat rencana kerja dan pendanaan indikatif perangkat daerah.

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2024, diperlukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD sampai dengan tahun 2022 Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan PD.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu (Tahun 2022) Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan dapat disajikan dalam tabel T-C.29 sebagai berikut :

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan

No.	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (2021)	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2022	Persentase Capaian RPJMD	Status Capaian
						Target 2022	Realisasi 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas										
<i>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>										
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK Outcome)	Persen	70	n/a	n/a	60	65	65	92,86	Tidak Tercapai
	- Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Persen	100	n/a	n/a	85	100	100	100	Tercapai
	- Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Perda	20	n/a	n/a	20	13	13	65	Tidak Tercapai
	- Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Persen	21	n/a	n/a	11	5	5	23,81	Tidak Tercapai
<i>Program Pencegahan, Penganggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</i>										
1	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	n/a	n/a	100	100	100	100	Tercapai
	- Persentase penanganan aduan kebakaran dan kedaruratan sipil non kebakaran	Persen	100	n/a	n/a	100	100	100	100	Tercapai
<p>1. Indikator Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome) : dari 20 Perda yang ada, ada 13 Perda yang ditegakkan. Hal ini disesuaikan dengan laporan pelanggaran perda dari masyarakat.</p> <p>2. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan berdasarkan laporan pelanggaran perda dari masyarakat mencakup 13 Perda dari target 20 Perda.</p> <p>3. Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS : jumlah PPNS Satpol PP pada tahun 2022 sebanyak 2 orang dibandingkan dengan jumlah PNS Satpol PP sebanyak 38 orang maka realisasi persentase Pol PP yang memiliki kualitas sebagai PPNS hanya 5%.</p>										

No.	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (2021)	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2022	Persentase Capaian RPJMD	Status Capaian
						Target 2022	Realisasi 2022			
Non Urusan										
<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	n/a	n/a	100	100	100	100	Tercapai
	- Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100	n/a	n/a	100	100	100	100	Tercapai
	- Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	n/a	n/a	100	100	100	100	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	n/a	n/a	100	100	100	100	Tercapai
	- Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	n/a	n/a	100	100	100	100	Tercapai
	- Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	n/a	n/a	100	100	100	100	Tercapai
	- Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	n/a	n/a	100	100	100	100	Tercapai
2	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	n/a	n/a	100	100	100	100	Tercapai
	- Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	n/a	n/a	100	100	100	100	Tercapai

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam Norma Standar Pelayanan Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan di bidang ketentraman, ketertibaman umum dan perlindungan masyarakat, maka cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja utama Rencana Strategis Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan.

Kinerja pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan dapat dilihat pada capaian pelaksanaan tugas pokoknya memimpin, merumuskan, mengatur, pembina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang ketentraman, ketertibaman umum dan perlindungan masyarakat.

Analisis kinerja pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang menjadi target pelayanan serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tabel. T.C-30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
Kota Pekalongan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai SAKIP OPD			71,50 Indeks	73 Indeks	74,50 Indeks	76 Indeks	73,80 Indeks	n/a	74,5 Indeks	76 Indeks	
2	Persentase penanganan bencana kebakaran	SPM		100%	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	
3	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM	SPM		60%	70%	80%	90%	82,40%	n/a	80%	90%	

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Analisis Tingkat Kinerja

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertibaman umum dan perlindungan masyarakat pada Pemerintah Kota Pekalongan, Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan telah menyusun program kerja dan kegiatan dalam Rencana Strategis yang memuat tugas pokok dan fungsi dan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pekalongan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Dalam RPJMD tersebut, Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan mendukung pencapaian misi 6 yaitu “Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlakul Karimah” dengan Tujuan “Menjamin kepastian hukum dan ketertiban umum” dan misi 7 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government” dengan tujuan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”.

Dalam pencapaian tujuan “Menjamin kepastian hukum dan ketertiban umum”, sasaran “Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum”, dengan Indikator Kinerja “Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan SPM”. Realisasi Indikator Kinerja tersebut pada tahun 2022 sebesar 82,40% dibanding target 60% maka capaian kinerjanya adalah 137,33%. Pencapaian tujuan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”, sasaran “Meningkatnya penanganan bencana kebakaran” dengan indikator kinerja “Persentase penanganan bencana kebakaran” pada tahun 2022 sebesar 100% dan sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah” dengan indikator “Nilai SAKIP OPD” pada tahun 2022 dengan target nilai indeks 71,50 dan realisasi 73,86 maka capaian kinerja 103,3%. Dari hasil capaian kinerja tersebut rata-rata capaian diatas 100% , maka capaian kinerja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan termasuk kategori sangat tinggi / sangat berhasil.

2.3.2 Permasalahan

Selama menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:

1. Rendahnya kepatuhan hukum dan pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berlaku;
2. Faktor Ekonomi dengan adanya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang membuat masyarakat beralih menjadi pedagang pasar tiban/PK5;
3. Terbatasnya lahan tempat berjualan bagi pedagang pasar tiban/PK5;
4. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
5. Belum optimalnya koordinasi internal antar seksi;
6. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
7. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP);
8. Belum optimalnya peran PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam melaksanakan tupoksinya;
9. Belum optimalnya koordinasi antar Aparat Penegak Hukum dan stakeholder terkait (Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan, POLRI, TNI, Kejaksaan, Bag.Hukum, Kesbangpol, Bea Cukai);
10. Perlunya peningkatan kompetensi SDM/personil Penegakan Perda dan petugas pemadam kebakaran;
11. Belum optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
12. Masih kurangnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran;

2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian Visi Misi

Menjaga ketentraman, ketertibaman umum dan perlindungan masyarakat yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan dalam hal ini Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan memegang peranan dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja pencapaian tujuan pemerintah. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja terbaik Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan akan berdampak langsung pada kinerja yang telah ditetapkan.

Terkait dengan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026, kinerja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan berdampak pada pencapaian misi “Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlakul Karimah” dan misi “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”.

2.3.4 Tantangan dan Peluang

Tantangan pengembangan pelayanan pada Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Bermunculannya pengamen, silverman, badut dan lainnya pada prempatan-perempatan lampu lalu lintas;
2. Bertambahnya jumlah pedagang kaki lima di wilayah Kota Pekalongan;
3. Adanya penolakan dari pihak yang melanggar aturan saat penegakkan Perda;
4. Banyaknya gang-gang kecil yang mempersulit pemadaman kebakaran;
5. Terbatasnya jumlah personil dan kompetensi personil pemadam kebakaran;
6. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait bahaya kebakaran, pencegahan dan penanganannya.

Peluang pengembangan pelayanan pada Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan keselamatan yang meningkatkan kerjasama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penegakkan peraturan;

2. Adanya kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan.

Isu strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas personil agar terlatih dan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam penanganan konflik, penegakan perda dan penanggulangan kebakaran;
2. Meningkatkan peralatan dan teknologi yang digunakan Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan peralatan modern dan canggih sehingga dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
3. Mengoptimalkan penggunaan sistem pemantauan dan peringatan dini yang lebih canggih, mutakhir dan handal;
4. Meningkatkan kerjasama antar Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan instansi terkait lainnya guna meningkatkan sinergi dalam penanganan konflik, penegakan perda dan penanggulangan kebakaran;
5. Mengoptimalkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Kota Pekalongan 2024 dimaksudkan untuk membandingkan anatar rumusan hasil indentifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan, dengan arahan Walikota Pekalongan terkait program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan berdasarkan rancangan awal RKPD Kota Pekalongan 2024.

Review terhadap rancangan awal RKPD Kota Pekalongan 2024, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program.kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan adalah:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPS Kota Pekalongan 2024;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Menyajikan dalam bentuk matrik tabel dengan menempatkan program/kegiatan yang sama pada garis yang sama untuk memudahkan analisis;
4. Melakukan pengecekan apakah program/kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan sudah termuat dalam rancangan awal RKPD. Jika belum termuat, maka perlu dibuatkan catatan penting;
5. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
6. Untuk jenis program dan kegiatan yang sesuai, dilakukan langkah berikut:
 - a. Mengecek apakah indikator kinerjanya sesuai, jika tidak, maka menentukan indikator yang akan dipilih;
 - b. Meneliti besaran tolok ukur atau target capaian program/kegiatan, bila terdapat perbedaan, maka mengkaji kembali besaran tersebut dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber dana lainnya; dan
 - c. Memberi catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja Perubahan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan.
7. Untuk jenis program dan kegiatan yang tidak sesuai (berbeda), dilakukan langkah berikut:
 - a. Untuk program dan kegiatan yang hanya terdapat di dalam rancangan awal RKPD Kota Pekalongan 2024, maupun yang hanya terdapat dalam identifikasi kebutuhan hasil analisis, melakukan pengecekan apakah masih layak untuk direncanakan, dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata, sasaran target Renstra visi-misi kepala daerah, dan ketersediaan pendanaan;
 - b. Meneliti kembali kemudian tentukan indikator yang akan dipilih;
 - c. Meneliti kembali kemudian tentukan besaran tolok ukur atau target capaian program dan kegiatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif

berdasarkan arahan rancangan awal RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 target capaian Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan serta ketersediaan dana lainnya;

- d. Memberi catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja SKPD.
8. Merumuskan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024 yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan; dan
9. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Rancangan Renja 2024 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan, tidak ada perubahan rumusan program dan kegiatan yang telah disusun. Proses perbandingan antara rancangan awal RKPD Kota Pekalongan 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dilakukan untuk mengetahui sesuai/tidak sesuai, cocok/ketidakcocokan besarnya (anggaran/volume/satuan) terhadap program dan kegiatan yang sudah dirumuskan.

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kota Pekalongan

Nama Perangkat Daerah : Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pekalongan	<ol style="list-style-type: none"> Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah 	<p>100 persen</p> <p>100 persen</p> <p>100 persen</p>	5.402.760.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pekalongan	<ol style="list-style-type: none"> Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah 	<p>100 persen</p> <p>100 persen</p> <p>100 persen</p>	5.402.760.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	15.960.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	15.960.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.320.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2.320.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1.640.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1.640.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	11 laporan	12.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	11 laporan	12.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	4.560.704.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	4.560.704.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	38 orang/bulan	4.502.384.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	38 orang/bulan	4.502.384.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	56.800.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	56.800.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir Tahu SKPD	1 laporan	1.520.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir Tahu SKPD	1 laporan	1.520.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	5.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	5.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 paket	5.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 paket	5.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	236.720.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	236.720.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	5.625.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	5.625.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	29.195.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	29.195.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 paket	7.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 paket	7.500.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	96.400.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	96.400.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pekalongan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	7.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pekalongan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	7.500.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	2.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	2.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150 laporan	88.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150 laporan	88.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	127.651.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	127.651.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	2.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	125.651.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	125.651.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	456.725.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	456.725.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	29 unit	389.230.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	29 unit	389.230.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	37.495.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	37.495.000	

No	Rancangan awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	66 unit	30.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	66 unit	30.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Pekalongan	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	66 persen	6.416.736.000	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Pekalongan	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	66 persen	6.416.736.000	
	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	95 persen	2.386.435.000	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	90 persen	2.386.435.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	40 dokumen	1.938.365.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	40 dokumen	1.938.365.000	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	2 dokumen	18.750.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	2 dokumen	18.750.000	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Pekalongan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	148 orang	33.600.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Pekalongan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	148 orang	33.600.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	2 dokumen	111.000.000	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	2 dokumen	111.000.000	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Pekalongan	Jumlah laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	300 laporan	77.000.000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Pekalongan	Jumlah laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawasan	300 laporan	77.000.000	
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Pekalongan	Jumlah laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	2000 laporan	194.480.000	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Pekalongan	Jumlah laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	2000 laporan	194.480.000	
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kota Pekalongan	Jumlah laporan penyediaan layanan dampak penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	4 laporan	13.240.000	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	4 laporan	13.240.000	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan	Kota Pekalongan	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK Output)	20 Perda	4.015.650.000	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali	Kota Pekalongan	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	20 Perda	4.015.650.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bupati/Wali Kota					Kota					
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Pekalongan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 laporan	59.069.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Pekalongan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 laporan	59.069.000	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Pekalongan	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP	12 laporan	3.941.581.000	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Pekalongan	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP	12 laporan	3.941.581.000	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Pekalongan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	48 laporan	15.000.000	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Pekalongan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	48 laporan	15.000.000	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	21 persen	14.651.000	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	21 persen	14.651.000	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Pekalongan	Jumlah laporan hasil pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS Penegak Perda	3 laporan	14.651.000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Pekalongan	Jumlah laporan hasil pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS Penegak Perda	3 laporan	14.651.000	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kota Pekalongan	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 persen	1.046.631.000	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kota Pekalongan	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 persen	1.046.631.000	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan	Kota Pekalongan	Persentase penanganan aduan kebakaran dan kedaruratan sipil non kebakaran	100 persen	896.719.000	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan	Kota Pekalongan	Persentase penanganan aduan kebakaran dan kedaruratan sipil non kebakaran	100 persen	896.719.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen NSPM pencegahan/penanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	4 dokumen	39.750.000	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen NSPM pencegahan/penanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	4 dokumen	39.750.000	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	250 laporan	798.419.000	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	250 laporan	789.419.000	
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kota Pekalongan	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	38 orang	15.000.000	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kota Pekalongan	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	38 orang	15.000.000	
	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Kota Pekalongan	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki sistem komunikasi & informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIKP) yang bisa di secara perbaharui atau dimutakhirkan secara berkala (Setiap Tahun), berkelanjutan dan real time yang dimiliki oleh desa/kelurahan setiap tahunnya	2 desa/ kelurahan	7.500.000	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Kota Pekalongan	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki sistem komunikasi & informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIKP) yang bisa di secara perbaharui atau dimutakhirkan secara berkala (Setiap Tahun), berkelanjutan dan real time yang dimiliki oleh desa/kelurahan setiap tahunnya	2 desa/ kelurahan	7.500.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Pekalongan	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	3 unit	11.350.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Pekalongan	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	3 unit	11.250.000	

No	Rancangan awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar wilayah Kabupaten/ Kota dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	3 dokumen	33.800.000	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar wilayah Kabupaten/ Kota dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	3 dokumen	33.800.000	
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kota Pekalongan	Persentase sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang dianalisis kesiapannya	100 persen	34.071.000	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kota Pekalongan	Persentase sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang dianalisis kesiapannya	100 persen	34.071.000	
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/ gedung/ lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran	12 dokumen	34.071.000	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/ gedung/ lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran	12 dokumen	34.071.000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kota Pekalongan	Persentase partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kebakaran	100 persen	61.328.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kota Pekalongan	Persentase partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kebakaran	100 persen	61.328.000	
	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Kota Pekalongan	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	320 orang	37.500.000	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Kota Pekalongan	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	320 orang	37.500.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kota Pekalongan	Jumlah desa/ kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	21 desa/ kelurahan	23.828.000	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kota Pekalongan	Jumlah desa/ kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	21 desa/ kelurahan	23.828.000	
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kota Pekalongan	Persentase penanganan kondisi membahayakan	100 persen	54.513.000	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kota Pekalongan	Persentase penanganan kondisi membahayakan	100 persen	54.513.000	
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Kota Pekalongan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan operasi penyelamatan yang mengancam keselamatan manusia	24 laporan	54.513.000	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	24 Laporan	54.513.000	

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam penyusunan program dan kegiatan terlebih dahulu menampung aspirasi masyarakat dari pemangku kepentingan, baik dari OPD terkait, kelompok masyarakat Kota Pekalongan yang langsung ditujukan kepada Perangkat daerah dan juga hasil tinjauan kelapangan.

Berdasarkan hasil rumusan dari pemangku kepentingan tersebut dilakukan penyesuaian dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah sekaligus merupakan program dan kegiatan yang merupakan isu-isu strategis Perangkat Daerah.

Akan tetapi pada Musrenbang Kota, Belum ada usulan dari pemangku kepentingan, baik dari SKPD terkait, kelompok masyarakat Kota Pekalongan

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat disajikan dalam tabel T-C.32 sebagaimana terlampir.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan nasional merupakan acuan utama bagi setiap daerah propinsi dan kabupaten kota dalam merumuskan kebijaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Arah kebijaksanaan pembangunan daerah kota harus didasari oleh visi dan misi daerah dan output akhirnya berupa pola dasar pembangunan daerah.

Kebijakan Pemerintah tentang Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 dimana dalam PP tersebut dijelaskan mengenai tugas Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan yaitu menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan dalam rencana program dan kegiatan didasari kepada Melindungi Segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara. Disini Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan berperan serta dalam proses melindungi segenap bangsa dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Pekalongan. Selanjutnya penjabaran program dan kegiatan yang menyangkut ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat secara konkrit dituangkan dalam bentuk rencana kerja tahunan dan operasionalnya dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 87 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol P3KP mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Satpol P3KP Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. penyelenggaraan kebijakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- h. penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
- i. pengarah dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
- j. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran tujuan Renstra yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan serta identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan- tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai sesuai tujuan organisasi.

Adapun tujuan dan sasaran Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan, telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik
 - Sasaran 1.1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
 - Sasaran 1.2 : Meningkatnya penanganan bencana kebakaran
2. Tujuan 2 : Menjamin kepastian hukum dan ketertiban umum
 - Sasaran 2.1 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan indikator sasaran dan formulasi/rumus perhitungan indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2024 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing seksi selaku penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan Jangka Menengah Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
Kota Pekalongan Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		1. Indeks Kepuasan Masyarakat	86,53 Indeks
		a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	a. Nilai Sakip Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	74,50 Indeks
		b. Meningkatnya penanganan bencana kebakaran	b. Persentase penanganan bencana kebakaran	100%
2.	Menjamin kepastian hukum dan ketertiban umum		1. Tingkat ketentraman dan ketertiban umum	100%
		a. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	a. Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM	80%

III.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Perangkat daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Rencana kerja tahun 2024 merupakan lanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas untuk mewujudkan tujuan dan sasarannya. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2023. Pada prinsipnya program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas sesuai pagu indikatif yang ditetapkan.

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebanyak 3 program, 13 kegiatan dan 40 sub kegiatan dengan jumlah pagu Rp. 12.866.127.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2024 tersebut dapat dilihat pada tabel T-C.33 sebagai berikut :

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.866.127.000				12.600.672.000
01.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				12.866.127.000				12.600.672.000
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<ol style="list-style-type: none"> Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah 	Kota Pekalongan	100 persen 100 persen 100 persen	5.402.760.000	DAU		100 persen 100 persen 100 persen	5.390.341.000
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pekalongan	100 persen	15.960.000	DAU		100 persen	62.450.000
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	2 dokumen	2.320.000	DAU		2 dokumen	10.750.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	2 dokumen	1.640.000	DAU		2 dokumen	1.650.000
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pekalongan	11 laporan	12.000.000	DAU		11 laporan	50.050.000
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Pekalongan	100 persen	4.560.704.000	DAU		100 persen	4.418.425.000
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kota Pekalongan	38 orang/ bulan	4.502.384.000	DAU		38 orang/ bulan	4.364.775.000
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Kota Pekalongan	12 dokumen	56.800.000	DAU		12 dokumen	52.000.000
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	1 laporan	1.520.000	DAU		1 laporan	1.650.000
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Pekalongan	100 persen	5.000.000	DAU		100 persen	9.500.000
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kota Pekalongan	1 paket	5.000.000	DAU		1 paket	9.500.000
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Kota Pekalongan	100 persen	236.720.000	DAU		100 persen	217.754.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Pekalongan	2 paket	5.625.000	DAU		2 paket	7.500.000
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Pekalongan	2 paket	29.195.000	DAU		2 paket	28.254.000
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kota Pekalongan	12 paket	7.500.000	DAU		12 paket	10.000.000
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Pekalongan	12 paket	96.400.000	DAU		12 paket	97.000.000
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Kota Pekalongan	12 paket	7.500.000	DAU		12 paket	7.500.000
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kota Pekalongan	12 dokumen	2.500.000	DAU		12 dokumen	2.500.000
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	150 laporan	88.000.000	DAU		150 laporan	65.000.000
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	100 persen	127.651.000	DAU		100 persen	130.858.000
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kota Pekalongan	12 laporan	2.000.000	DAU		12 laporan	2.000.000
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kota Pekalongan	12 laporan	125.651.000	DAU		12 laporan	128.858.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	100 persen	456.725.000	DAU		100 persen	551.354.000
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Pekalongan	29 unit	389.230.000	DAU		29 unit	400.000.000
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kota Pekalongan	2 unit	37.495.000	DAU		2 unit	111.354.000
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kota Pekalongan	66 unit	30.000.000	DAU		66 unit	40.000.000
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Kota Pekalongan	66 persen	6.416.736.000	DAU		70 persen	6.041.523.000
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Kota Pekalongan	95 persen	2.386.435.000	DAU		100 persen	1.822.410.000
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	40 dokumen	1.938.365.000	DAU		40 dokumen	1.020.410.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Kota Pekalongan	2 dokumen	18.750.000	DAU		2 dokumen	25.000.000
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kota Pekalongan	148 orang	33.600.000	DAU		148 orang	48.000.000
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	Kota Pekalongan	2 dokumen	111.000.000	DAU		2 dokumen	148.000.000
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui Deteksi Dini dan cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kota Pekalongan	300 laporan	77.000.000	DAU		300 laporan	106.000.000
1.05.02.2.01.0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	Kota Pekalongan	2000 laporan	194.480.000	DAU		2000 laporan	450.000.000
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah laporan penyediaan layanan dampak penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	Kota Pekalongan	4 laporan	13.240.000	DAU		4 laporan	25.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK Output)	Kota Pekalongan	20 Perda	4.015.650.000	DAU		20 Perda	4.199.854.000
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Pekalongan	12 laporan	59.069.000	DAU		12 laporan	133.873.000
1.05.02.2.02.0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP	Kota Pekalongan	12 laporan	3.941.581.000	DAU		12 laporan	4.045.981.000
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Pekalongan	48 laporan	15.000.000	DAU		48 laporan	20.000.000
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Kota Pekalongan	16 persen	14.651.000	DAU		21 persen	19.259.000
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah laporan hasil pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS Penegak Perda	Kota Pekalongan	3 laporan	14.651.0000	DAU		3 laporan	19.259.000
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Kota Pekalongan	100 persen	1.046.631.000	DAU		100 persen	1.168.808.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan aduan kebakaran dan kedaruratan sipil non kebakaran	Kota Pekalongan	100 persen	896.719.000	DAU		100 persen	971.737.000
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen NSPM pencegahan/penanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Kota Pekalongan	4 dokumen	39.750.000	DAU		4 dokumen	53.000.000
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	250 laporan	798.419.000	DAU		250 laporan	833.737.000
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Kota Pekalongan	38 orang	15.000.000	DAU		38 orang	20.000.000
1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki sistem komunikasi & informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIKP) yang bisa di secara perbaharui atau dimutakhirkan secara berkala (Setiap Tahun), berkelanjutan dan real time yang dimiliki oleh desa/kelurahan setiap tahunnya	Kota Pekalongan	2 desa/ kelurahan	7.500000	DAU		2 desa/ kelurahan	10.000.000
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	Kota Pekalongan	3 unit	11.350.000	DAU		3 unit	15.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar wilayah Kabupaten/ Kota dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Kota Pekalongan	3 dokumen	33.800.000	DAU		3 dokumen	40.000.000
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang dianalisis kesiapannya	Kota Pekalongan	100 persen	34.071.000	DAU		100 persen	44.789.000
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/ gedung/ lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran	Kota Pekalongan	12 dokumen	34.071.000	DAU		12 dokumen	44.789.000
1.05.04.2.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kebakaran	Kota Pekalongan	100 persen	61.328.000	DAU		100 persen	80.620.000
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	Kota Pekalongan	320 orang	37.500.000	DAU		320 orang	50.000.000
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah desa/ kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	Kota Pekalongan	21 desa/ kelurahan	23.828.000	DAU		21 desa/ kelurahan	30.620.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase penanganan kondisi membahayakan	Kota Pekalongan	100 persen	54.513.000	DAU		100 persen	71.662.000
1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan operasi penyelamatan yang mengancam keselamatan manusia	Kota Pekalongan	24 laporan	54.513.000	DAU		24 laporan	71.662.000

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana program dan kegiatan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kota Pekalongan yang tertuang dalam RPJMD. Program kerja utama Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kota Pekalongan adalah :

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja dari program tersebut menjadi tanggung jawab Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan dalam evaluasi RKPD dan LKPJ. Target capaian kinerja tahun 2024 yang direncanakan dalam Renstra Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja
Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2024
1	2	3	4	5
Misi 6 RPJMD : Melestarikan budaya, kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlakul karimah				
1	Menjamin kepastian hukum dan ketertiban umum		Tingkat ketentraman dan ketertiban umum	100 Persen
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM	80 Persen
Misi 7 RPJMD : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i>				
1	Meningkatkan kualitas layanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	86,53 Indeks
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	74,50 Indeks
		Meningkatnya penanganan bencana kebakaran	Persentase penanganan bencana kebakaran	100 Persen

Dalam Renja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2023 terdapat 13 kegiatan dan 40 sub kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Setiap sub kegiatan juga telah dirumuskan indikator kinerja sub kegiatan. Perumusan sub kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh kegiatan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Kebutuhan pendanaan pada Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan untuk tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 4.2
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Anggaran
Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota pekalongan
Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Suber Dana
1	2	3	4
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12.866.127.000	
01.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12.866.127.000	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.402.760.000	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.960.000	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.560.704.000	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.502.384.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	56.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Suber Dana
1	2	3	4
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.520.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	236.720.000	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.195.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	96.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.651.000	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.651.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	456.725.000	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	389.230.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.495.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.416.736.000	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.386.435.000	
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1.938.365.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Suber Dana
1	2	3	4
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	33.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	111.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	77.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.02.2.01.0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	194.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	13.240.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4.015.650.000	
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	59.069.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.02.2.02.0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	3.941.581.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	14.651.000	
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	14.651.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.046.631.000	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	896.719.000	
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	39.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	798.419.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	7.500000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	11.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Suber Dana
1	2	3	4
1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	33.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	34.071.000	
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	34.071.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.04.2.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	61.328.000	
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	37.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	23.828.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	54.513.000	
1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	54.513.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (Renja) Satpol P3KP Kota Pekalongan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Satpol P3KP. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Satpol P3KP Kota Pekalongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan yang diemban oleh Satpol P3KP sebagai salah satu Perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan.

Semoga Renja Satpol P3KP Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2024. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Pekalongan, 9 Agustus 2023
Kepala Pelaksana,
Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
Kota Pekalongan



SRIYANA, S.Sos, M.Si
NIP. 19680709 199003 1 008